



Laporan Percepatan Pembangunan Papua



PERIODE FEBRUARI 2025





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan dengan baik oleh Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya maupun Anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Pelaksanaan SHEK pada bulan ini, difokuskan kepada review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Review dianggap perlu sebagai bagian dari tugas pendampingan dalam perencanaan dan penyusunan program kerja yang beririsan dan/ atau mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.

Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK (sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi) dilakukan dalam rangka pendampingan guna mengontrol/memonitoring secara baik terkait tahapan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD). Dalam pendampingan ini diperlukan kolaborasi bersama Kementerian Keuangan guna memastikan bahwa tepat salur, tepat perencanaan dan tepat sasaran.

Kegiatan-Kegiatan Strategis





KEGIATAN STRATEGIS 1

Pada tanggal **03 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Rapat Konfirmasi Mengenai Tanah Hibah Program Pembangunan 3 Juta Rumah di Auala KPPN Sorong**.

Hasil kegiatan :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong belum menerima informasi terstruktur dan resmi mengenai program pembangunan 3 juta rumah dan belum menerima informasi terkait data tanah yang dihibahkan serta siap mendukung dan mengikuti program pembangunan 3 juta rumah dan ada beberapa distrik yang teridentifikasi membutuhkan pembangunan rumah layak huni seperti Distrik Sayosa Timur.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat menyampaikan informasi terkait tersedianya lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah yang dibuktikan dengan pernyataan kepemilikan tanah namun, beberapa diantaranya belum memiliki sertifikat rumah.
3. BPN Kabupaten Sorong belum menerima informasi/belum adanya sinkronisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Roadmap program pembangunan 3 juta rumah.
4. BPN Kabupaten Raja Ampat siap mendukung pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat untuk berkolaborasi dalam program pembangunan 3 juta rumah.
5. Masyarakat penghibah tanah menyampaikan bahwa beberapa tanah belum memiliki sertifikat dan mereka sangat antusias menunggu realisasi program pembangunan 3 juta rumah tersebut.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Usulan yang disampaikan melalui organisasi MPG (Masyarakat Pendukung Gibran) hendaknya perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara teliti oleh tim terkait untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari.
2. Perlu adanya regulasi yang mengatur terkait Roadmap program pembangunan 3 juta rumah.
3. Pengusulan tanah hibah perlu mendapatkan pengakuan/persetujuan hak adat dari lembaga adat.
4. Perlu membentuk tim untuk melakukan komunikasi dan verifikasi lahan/tanah hibah yang diusulkan.
5. Perlu penentuan titik GPS dan memastikan sesuai dengan konsep RTRW.
6. Perlu identifikasi calon penerima/manfaat program pembangunan 3 juta rumah apabila positif direalisasikan.





KEGIATAN STRATEGIS 2

Pada tanggal **04 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama Organisasi Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Masyarakat Pendukung Gibran (MPG)** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

BP3OKP PBD mendapatkan informasi mengenai organisasi MPG (Masyarakat Pendukung Gibran). Di tingkat pusat MPG diketuai oleh Pak Jimmy Sidabutar. MPG juga telah melakukan koordinasi dengan 2 kabupaten yakni Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat dengan ruang lingkup koordinasi yakni identifikasi pemilik lahan, kelengkapan dokumen/berkas terkait kesediaan penyiapan lahan oleh pemilik lahan untuk selanjutnya dijadikan sebagai salah satu syarat pengusulan pembangunan rumah.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. BP3OKP PBD akan melakukan koordinasi tindaklanjut dan memberikan laporan kepada Asisten Deputi Bidang Politik, Keamanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Wakil Presiden terkait informasi profil organisasi MPG, status organisasi MPG, dan memberikan laporan singkat terkait kegiatan awal yang telah dilakukan bersama organisasi MPG terkait usulan tanah hibah untuk program pembangunan 3 juta rumah.
2. Perlu untuk segera mengeluarkan SK untuk DPD MPG di tingkat daerah/provinsi khususnya di Provinsi Papua Barat Daya.
3. Organisasi MPG perlu untuk mengkoordinasikan terkait usulan tanah hibah dalam rangka program 3 juta rumah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat Daya.





KEGIATAN STRATEGIS 3



Pada tanggal **04 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama Pengurus RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

BP3OKP PBD menerima laporan mengenai kekosongan nakes dokter spesialis anak dan satu dokter SpOG yang meninggalkan tempat tugas sebelum masa tugas selesai dikarenakan belum dilakukan pembayaran insentif dan jasa medis/pelayanan per bulan November dan Desember tahun 2024, serta laporan mengenai kekosongan anggaran untuk pembayaran insentif dan jasa nakes di RSUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu adanya komunikasi kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Selatan untuk konfirmasi mengenai permasalahan keterlambatan pembayaran insentif.



KEGIATAN STRATEGIS 4

Pada tanggal **06 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Rapat/Diskusi Bersama Asisten Deputi Politik, Keamanan, Hukum dan HAM Sekretariat Wakil Presiden** di **Sekretariat Wakil Presiden RI Jakarta**.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP PBD menyampaikan terkait kinerja/kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. BP3OKP PBD melaporkan terkait hasil pertemuan/rapat terkait konfirmasi usulan tanah hibah untuk program pembangunan 3 juta rumah yang dikirimkan oleh organisasi MPG (Masyarakat Pendukung Gibran).
3. BP3OKP PBD melaporkan terkait isu strategis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya.
4. BP3OKP PBD meminta dukungan dari Sekretariat Wakil Presiden dalam rangka pelaksanaan tuis SHEK di Jakarta dengan beberapa K/L yang dilaksanakan pada bulan Februari 2025.
5. BP3OKP PBD menyampaikan kendala-kendala internal yang dihadapi seperti, pemberhentian Jabatan Fungsional Anggota Pokja, dsb.
6. BP3OKP PBD mendapat apresiasi dari Asdep PKHHAM Sekretariat Wakil Presiden RI.
7. Asdep PKHHAM Sekretariat Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa, terkait pemberhentian Jabatan Fungsional perlu adanya koordinasi langsung dengan BKN RI dan Kementerian Induk Anggota Pokja (Kemenkes dan Kemendiktisaintek).

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu adanya optimalisasi kinerja Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura.
2. BP3OKP PBD akan berkoordinasi dan berkonsultasi secara langsung dengan BKN RI dan Kementerian Induk Anggota Pokja (Kemenkes dan Kemendiktisaintek/Kemendikdasmen) bagian Biro Sumber Daya Manusia.
3. BP3OKP PBD akan berkoordinasi dan berkonsultasi secara langsung dengan BGN terkait mekanisme/petunjuk teknis pelaksanaan program MBG.
4. BP3OKP PBD akan berkoordinasi terkait program pembangunan 3 juta rumah kepada Wamendagri.





KEGIATAN STRATEGIS 5

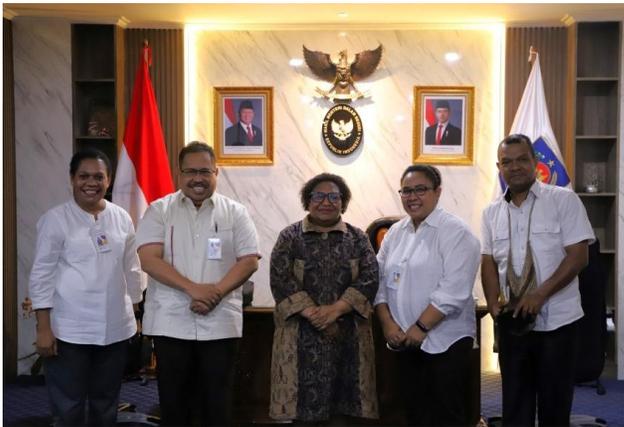
Pada tanggal **06 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri Jakarta**.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mendapatkan apresiasi dari Wamendagri atas kinerja dan pelaksanaan tugas serta fungsi SHEK yang telah dijalankan.
2. Wamendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah telah mendesain mekanisme Musrenbang Otsus untuk dilaksanakan pada tahun 2025 ini.
3. Progres draft Perpres RAPPD saat ini sedang pada tahapan penetapan oleh Presiden RI. Harapannya dapat selesai pada tahun 2025 ini agar dapat segera digunakan.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu adanya penjadwalan pleno BP3OKP.
2. BP3OKP memerlukan dukungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga, dimohon agar perangkat struktur yang memperlancar tuis BP3OKP agar dilengkapi dengan serius.
3. Perlu adanya petunjuk teknis terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Perlu adanya perhatian dari OPD dalam penyusunan program. Disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan ketersediaan anggaran.
5. Perlu kepastian terkait penetapan Perpres RAPPD.
6. Perlu dirumuskan terkait indikator capaian/output program MBG.
7. BP3OKP PBD perlu melakukan koordinasi tindaklanjut terkait program 3 juta rumah.
8. BP3OKP PBD akan mengawal pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya dengan tetap mengacu pada tuis SHEK.





KEGIATAN STRATEGIS 6

Pada tanggal **10 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Konsultasi dan Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional** di **Kantor BGN Kementerian Pertanian Jakarta**.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah berperan aktif mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya
2. BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait permohonan mekanisme/petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program MBG
3. Respon BGN :
 - a. BGN mengapresiasi peran BP3OKP dalam mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya.
 - b. BGN mengharapkan adanya kolaborasi dengan BP3OKP untuk mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya.
 - c. Petunjuk Teknis (Juknis) segera ditindaklanjuti.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Mekanisme/juknis MBG perlu untuk segera dipublikasikan/disampaikan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik, mengingat program MBG ini segera dijalankan di setiap daerah.
2. Pelaksanaan MBG perlu untuk dikolaborasikan dan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.





KEGIATAN STRATEGIS 7

Pada tanggal **10 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Konsultasi dan Koordinasi dengan Direktorat Kelembagaan Kemendikisaintek RI** di **Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Jakarta**.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP PBD menyampaikan terkait permohonan arahan mengenai pendirian akademi komunitas di Provinsi Papua Barat Daya.
2. Respon Direktorat Kelembagaan Kemendikisaintek RI :
 - a. Pendirian akademi komunitas perlu kebijakan antar pimpinan mengingat, hingga saat ini moratorium pembukaan PTN/PTS di Indonesia belum dicabut.
 - b. Pendirian akademi komunitas disarankan/ direkomendasikan yang statusnya Swasta.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Pendirian akademi komunitas dapat dibentuk dengan melakukan analisis awal untuk selanjutnya dipresentasikan/dikonsultasikan dengan Dirjen Kelembagaan Kemendikisaintek RI.
2. Diperlukan kajian mendalam antar pimpinan terkait pendirian akademi komunitas sesuai amanat UU dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
3. Diperlukan komunikasi antar pimpinan untuk mendapatkan kebijakan khusus (special diskresi) mengingat, pendirian akademi komunitas adalah salah satu yang diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus dan melalui PP Nomor 106 Tahun 2021 disampaikan bahwa kewenangan pengelolaannya adalah Pemerintah Provinsi.





KEGIATAN STRATEGIS 8

Pada tanggal **10 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Konsultasi dan Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta.**

Hasil kegiatan :

BP3OKP PBD menyampaikan terkait beberapa hal :

- a. Memfollow up kembali terkait usulan RS UPT Vertikal Kemenkes di Provinsi Papua Barat Daya.
- b. Perlu adanya pengawasan terhadap dana TKD khususnya pada sektor pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya.
- c. Beberapa pelayanan kesehatan perlu dihadirkan di Provinsi Papua Barat Daya seperti Laboratorium dan Command Center.
- d. Perlu dipertimbangkan dengan baik terkait perencanaan pengadaan SDM Kesehatan di wilayah Papua.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. BP3OKP PBD bersama Gubernur dan Pemda akan mengusulkan dan memfollow up terkait RS UPT Kemenkes di Provinsi Papua Barat Daya.
2. Bupati Tambrau segera membuat permohonan agar dapat dilakukan relokasi kembali Dana Alokasi Khusus yang gagal transfer sebelumnya, serta perlu untuk berkoordinasi dengan Bappenas dan Kemenkeu agar dapat dilakukan justifikasi untuk penganggaran kembali dengan risiko tidak bisa dilaksanakan sekaligus sehingga, perlu adanya cost sharing pembangunan antara Pemerintah Pusat-Daerah-Kabupaten Tambrau.
3. Perlu adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya dengan Bapperida PBD terkait usulan program kegiatan, sekaligus komunikasi dengan Kementerian Kesehatan.





KEGIATAN STRATEGIS 9

Pada tanggal **11 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Konsultasi dan Koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia Kemenkes RI di Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta.**



Hasil kegiatan :

BP3OKP PBD melakukan tugas dan fungsi SHEK yakni evaluasi terhadap program peningkatan akses dan kualitas fasilitas kesehatan baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi. Salah satunya adalah, pemenuhan SDM bidang kesehatan, dalam hal ini pelayanan spesialisik yang seharusnya dipenuhi oleh RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatn sebagai komitmen terhadap layanan pada Masyarakat.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu segera dilaksanakan koordinasi antara Pemda dan Kementerian Kesehatan terkait pemenuhan tenaga/SDM dokter spesialis serta penjaminan pembiayaan bidang kesehatan untuk mencegah terjadinya pemblokiran terhadap Kabupaten Sorong Selatan sebagai salah satu wilayah penerima layanan tenaga Spesialis dari Kementerian Kesehatan.
2. Perlu pengambilan langkah-langkah praktis strategis untuk menyelesaikan permasalahan kekosongan dokter spesialis anak dalam jangka pendek, serta koordinasi dengan Pemda untuk merencanakan langkah-langkah pengadaan dokter spesialis anak dalam jangka panjang.



KEGIATAN STRATEGIS 10



Pada tanggal **13 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Diskusi Bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)** di Kantor LPDP Jakarta.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP melaksanakan tugas dan fungsi SHEK dengan LPDP terkait Beasiswa LPDP Afirmasi Putra/Putri Papua.
2. BP3OKP mendapatkan informasi secara detail terkait beasiswa LPDP afirmasi Putra/i Papua (informasi persyaratan, mekanisme, dll).

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu optimalisasi publikasi terkait informasi beasiswa LPDP afirmasi Putra/i Papua agar dapat menjangkau masyarakat OAP, lebih khusus yang berada/tinggal di kampung-kampung.





KEGIATAN STRATEGIS 11



Pada tanggal **17 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan **Peresmian Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023, 2024 dan 2025** di **Terminal B Km. 12 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

Sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan DAK tersedia tidak hanya di Kota Sorong saja namun, tersedia juga di Kabupaten/Kabupaten. Tersedia di Kota Sorong sebagai pusat pelaksanaan kegiatan yang dimaksud, dalam hal ini adalah Terminal Tipe B.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu pemanfaatan secara optimal terkait hasil-hasil pembangunan DAK Fisik.
2. Pengawasan dan pemeliharaan DAK Fisik perlu menjadi catatan penting, agar aset ini dapat berkelanjutan dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dapat bermanfaat untuk melayani masyarakat.



KEGIATAN STRATEGIS 12



Pada tanggal **18 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan **Simposium Regional Penyusunan Usulan Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat Daya** di **Hotel Rylich Panorama Sorong, Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan terkait pentingnya Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

Perlu untuk segera dibentuk Tim Lintas Sektoral guna mendorong Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya.



KEGIATAN STRATEGIS 13

Pada tanggal **26 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi Bersama UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.



Hasil kegiatan :

BP3OKP PBD mendapatkan informasi terkait UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan. Informasi yang diperoleh yakni profile dan produk-produk yang dijual. UMKM Mitra Tani merupakan kelompok usaha yang mengelola makanan ringan dari bahan baku sagu dan pisang, yang dalam pengelolaannya melibatkan ibu-ibu rumah tangga sekitar.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Perlu adanya koordinasi lanjut bersama dinas terkait di Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan dukungan kepada pelaku usaha (UMKM Mitra Tani).
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal seperti UMKM Mitra Tani tersebut.
3. Proses pengajuan izin BPOM dan peningkatan penyaluran produk perlu dukungan dari pihak dinas terkait maupun pemda Kabupaten Sorong Selatan.



KEGIATAN STRATEGIS 14

Pada tanggal **27 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Rapat Koordinasi Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat Daya** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

1. BP3OKP PBD mensosialisasikan terkait kelembagaan BP3OKP.
2. BP3OKP PBD menyampaikan terkait kinerja/kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. BP3OKP PBD menyampaikan isu-isu strategis di Provinsi Papua Barat Daya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. BP3OKP PBD menyampaikan terkait permohonan dukungan dalam rangka pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya.
5. BP3OKP PBD menyampaikan terkait peran-peran yang dapat dilakukan oleh FKUB dalam pelaksanaan program MBG.
6. Respon FKUB :
 - a. Menyatakan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program MBG di PBD.
 - b. Menyampaikan bahwa apabila ada program-program pemerintah sebaiknya perlu ada sosialisasi.
 - c. Perlu adanya pertemuan dengan Keuskupan Manokwari-Sorong dalam rangka kolaborasi pada pelaksanaan program MBG di PBD.
 - d. Menyampaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi, salah satunya yakni terkait pengelolaan/manajemen klinik kesehatan milik organisasi keagamaan yang bermasalah sehingga, perlu adanya pendampingan bagi berbagai klinik yang dikembangkan oleh organisasi keagamaan di wilayah Papua Barat Daya.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Pembentukan Satgas MBG dan Satgas Ketahanan Pangan perlu keterlibatan dari pihak organisasi keagamaan.
2. BP3OKP PBD akan merencanakan akan melaksanakan pertemuan dengan Keuskupan Manokwari-Sorong.
3. Organisasi keagamaan sebaiknya sudah dapat mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka kolaborasi pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan proses pembelajaran terkait tata cara pengaturan/manajemen pengelolaan dapur.





KEGIATAN STRATEGIS 15

Pada tanggal **27 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Giat Wawancara Bersama Wartawan Suara Papua** di **Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya**.

Hasil kegiatan :

BP3OKP PBD menerima wawancara terkait Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. BP3OKP PBD menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi perlu untuk memperhatikan prinsip efisiensi. Selain itu, BP3OKP PBD menyampaikan terkait tugas dan fungsinya serta kinerja yang telah dilaksanakan (baik secara keseluruhan maupun sesuai misi RIPP-Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif).

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. BP3OKP PBD akan terus melakukan sharing informasi terkait kebijakan pemerintah kepada media publikasi dengan meningkatkan peran wartawan sebagai media publikasi.
2. Perlu publikasi secara berkala terkait peran dan kinerja BP3OKP PBD.





KEGIATAN STRATEGIS 16

Pada tanggal **28 Februari 2025**, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan **Audiensi (Diskusi) Bersama Danrem 181/PVT di Makorem 181/PVT.**

Hasil kegiatan :

1. Sinergitas antara BP3OKP PBD dan Korem 181/PVT.
2. BP3OKP PBD mendapatkan informasi terkait Korem 181/PVT.
3. Koordinasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik.
4. Usulan BP3OKP PBD : perlu keterlibatan dari kelembagaan gereja dalam pelaksanaan program MBG di PBD, perlu dibentuk 2 satgas yakni satgas MBG dan satgas ketahanan pangan.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut :

1. Satgas perlu untuk segera dibentuk.
2. Perlu adanya koordinasi lebih erat lagi antara peran Bhabinkamtibmas dan instansi terkait (penyuluh pertanian) terkait satgas ketahanan pangan.
3. Segera bangun kolaborasi dengan kelembagaan gereja untuk pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya.



Capaian





CAPAIAN (1)

Bulan Februari 2025 menjadi periode penting dalam mengevaluasi kelanjutan pencapaian kinerja yang telah diraih sejak tahun 2024 dan bulan Januari 2025. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencapai visi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 yakni “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”. Capaian pada bulan Februari ini tidak hanya mencerminkan hasil dari pelaksanaan tugas-tugas sebelumnya, tetapi juga menunjukkan **komitmen** untuk mempertahankan momentum dan menyempurnakan setiap langkah yang telah diambil.

Beberapa capaian utama bulan **Februari 2025** antara lain :

Misi BP3OKP PBD

BP3OKP PBD telah bersinergi dan berkolaborasi dengan baik bersama Pemerintah Pusat K/L, Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kab/Kota maupun OPD dan Stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya. Beberapa diantaranya yaitu :

1. BP3OKP PBD telah menindaklanjuti arahan dari Asisten Deputi Bidang Politik, Kemanan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (PKHHAM) Sekretariat Wakil Presiden terkait isu strategis usulan tanah hibah untuk program pembangunan 3 juta rumah dari organisasi Masyarakat Pendukung Gibran (MPG). BP3OKP PBD melaksanakan pertemuan/rapat terkait isu strategis tersebut dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. BP3OKP PBD telah berkoordinasi dengan Wamendagri terkait isu strategis pembangunan 3 juta rumah, pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya dan isu-isu strategis lainnya.
3. BP3OKP PBD telah berkoordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka membangun sinergitas dan kolaborasi bersama guna memperlancar proses dan keberhasilan pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.
4. BP3OKP PBD juga ikut serta/berpartisipasi dalam kegiatan Peresmian Kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2023, 2024, 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.



CAPAIAN (2)

Misi Papua Sehat

1. Sebagai tindaklanjut kegiatan Sosialisasi Akreditasi RSU Kelas D Pratama Kab. Tambrauw yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu, BP3OKP PBD telah membantu pihak RSU Kelas D Pratama Kab. Tambrauw dalam proses akreditasi rumah sakit. Awalnya, diinformasikan bahwa hasil survei akan diterima pada bulan Mei 2025. Namun, hasil survei ternyata telah diterima pada bulan Februari 2025 ini, dengan hasil, **RSU Kelas D Pratama Kab. Tambrauw berhasil meraih akreditasi dengan tingkat kelulusan "Paripurna"**.
2. Pada tanggal 4 Februari 2025, BP3OKP PBD menerima permohonan audiensi dari Pihak RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan. Pihak RSUD menyampaikan terkait kendala yang dihadapi yakni terjadi kekosongan dokter spesialis. Menindaklanjuti hal tersebut, BP3OKP PBD melakukan koordinasi dan konsultasi di tingkat pemerintah pusat yaitu Kementerian Kesehatan RI. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak RSUD Scholoo Keyen Kab. Sorong Selatan.
3. BP3OKP PBD juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI bidang Biro Perencanaan dan Anggaran terkait follow up usulan RS UPT Vertikal Kemenkes di Provinsi Papua Barat Daya serta isu-isu strategis perencanaan lainnya. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak/OPD Terkait.





CAPAIAN (3)

Misi Papua Cerdas

1. Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, BP3OKP PBD telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi khususnya dengan bagian Direktorat Kelembagaan terkait pendirian akademi komunitas. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak/OPD Terkait.
2. BP3OKP PBD juga melaksanakan koordinasi bersama LPDP terkait Beasiswa LPDP dengan kategori Afirmasi bagi Putra/I Papua. Hasil dan rekomendasi-rekomendasi yang telah diperoleh, selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tuis SHEK bersama Pihak/OPD Terkait.

Misi Papua Produktif

1. Dalam rangka pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), BP3OKP PBD membangun sinergi dengan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional. Selain membangun sinergitas, dalam rangka pelaksanaan program MBG di Provinsi Papua Barat Daya, BP3OKP PBD telah melaksanakan koordinasi dengan BGN terkait permohonan mekanisme/petunjuk teknis (juknis) guna mendukung pelaksanaan program tersebut.
2. Pada tanggal 26 Februari 2025, BP3OKP PBD menerima permohonan audiensi dari UMKM Mitra Tani Kabupaten Sorong Selatan. Pihak UMKM menyampaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan/manajemen usaha. Salah satu hal yang direkomendasikan oleh BP3OKP PBD adalah perlunya dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha ekonomi lokal, apabila usaha ekonomi lokal dapat berjalan dengan optimal maka, dapat menurunkan angka tingkat kemiskinan pada daerah tersebut.
3. Kolaborasi BP3OKP PBD bersama Korem 181/PVT dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat Daya. BP3OKP PBD menginisiasi keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program tersebut termasuk keterlibatan dari organisasi keagamaan.



CAPAIAN (4)

Misi Papua Damai

BP3OKP PBD ikut serta/berpartisipasi pada kegiatan Simposium Regional Penyiapan Usulan Rancangan Perda Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat Daya yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Bentang Alam Papua PBD pada tanggal 18 Februari 2025. BP3OKP PBD memberi rekomendasi tindaklanjut yakni perlu untuk segera dibentuk Tim Lintas Sektoral guna mendorong Peraturan Daerah Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya.

Melalui uraian capaian di atas, dapat digali pembelajaran dari pelaksanaan tugas yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk **mencapai target yang lebih tinggi di masa mendatang. Capaian di bulan Februari ini juga merupakan refleksi dari upaya kolaboratif dan kerja keras yang terus dipupuk sejak awal pelaksanaan tugas BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya hingga saat ini.**

Rekomendasi





REKOMENDASI (1)

No	REKOMENDASI MISI SEHAT
1	Pemerintah daerah di Papua wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan menyediakan SDM yang professional dan kompeten melalui pembiayaan yang jelas dan terukur.
2	Perencanaan penganggaran khususnya belanja pengelolaan SDM menyangkut gaji dan insentif sebaiknya dilakukan secara teliti dan rutin selama 12 bulan.
3	Perlu pengawasan terhadap rumah sakit daerah terkait pengelolaan dan manajemen yang professional serta memperhitungkan setiap aspek pelayanan dengan komprehensif.
4	Bila ada regulasi yang diterbitkan maka, perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada stakeholder yang akan menerima dampak dari regulasi tersebut.
5	Perlu adanya standar besaran insentif bagi wilayah di Papua agar tenaga medis dan nakes tidak cenderung memilih wilayah kerja berdasarkan jumlah salary.

No	REKOMENDASI MISI CERDAS
1	Review RKA Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota perlu diselesaikan sebagai dasar untuk menyiapkan data pendampingan Musrenbang tahun 2026.
2	Mendorong pendefinisian pendidikan khusus (Amanat PP Nomor 106 Tahun 2021) di Provinsi Papua Barat Daya melalui Peraturan Gubernur.



REKOMENDASI (2)

No	REKOMENDASI MISI PRODUKTIF
1	Perlu adanya Satgas yang bertugas untuk penyiapan lahan program pembangunan 3 juta rumah.
2	Perlu koordinasi lanjut dengan Kementerian/lembaga terkait roadmap program pembangunan 3 juta rumah.
3	Perlu koordinasi lanjut dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya terkait Satgas MBG dan Satgas Ketahanan Pangan.
4	Perlu koordinasi lanjut dengan Dinas yang menangani UMKM di Kabupaten Sorong Selatan dalam rangka dukungan kepada pelaku-pelaku usaha di Kabupaten Sorong Selatan.

No	REKOMENDASI MISI POLHUKAM/DAMAI
1	Perlu koordinasi lanjut terkait pembentukan tim guna mendorong terbitnya Peraturan Daerah terkait Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua Barat Daya.

Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua** Periode Bulan **Februari 2025** **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.**

